

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah daerah. Spilane (dalam Susilawati, 2016) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain secara temporer untuk memperoleh kebahagiaan, keseimbangan dengan lingkungan sosial, budaya, alam, serta ilmu pengetahuan. Dengan sifatnya yang kompleks, pengelolaan pariwisata membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar dapat memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang optimal.

Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata (dalam Zaenuri; 2016).

Pariwisata merupakan salah satu sumber pemasukan suatu daerah, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dengan baik supaya dapat memaksimalkan pendapatan dan juga pembangunan suatu daerah. Suatu pembangunan dikatakan ideal ketika potensi yang dimiliki wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, manusia, maupun sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025, pariwisata di daerah ini dikembangkan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027. Pada tahun 2022, Kabupaten Purbalingga menempati posisi kedua setelah Kabupaten Klaten dalam kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. (Lihat tabel 1.1)

**Tabel 1. 1 Lima Kabupaten/Kota Penyumbang Pendapatan Pariwisata
Terbesar**

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1.	Kabupaten Klaten	39,266,623,580	21,14
2.	Kabupaten Purbalingga	26,941,677,175	14,50
3.	Kabupaten Semarang	25,253,716,027	13,59
4.	Kabupaten Banjarnegara	23,386,295,003	12,59
5.	Kabupaten Kebumen	14,069,974,580	7,57

Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2022, diolah penulis (2023)

Usaha pengembangan kepariwisataan didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025. Regulasi ini mengatur berbagai aspek pengembangan pariwisata, termasuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan dalam peraturan ini mencakup penguatan peran pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pembentukan serta pengembangan organisasi kepariwisataan. Tujuannya adalah menciptakan struktur kelembagaan yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Adapun aspek-aspek utama dalam pengembangan pariwisata yang disebutkan dalam peraturan ini, yaitu:

1. Penguatan Peran Pemerintah Daerah:

- Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam pengembangan pariwisata.
- Penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan program kepariwisataan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal:

- Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.

3. Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Kepariwisataan:

- Pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai wadah partisipasi masyarakat.
- Pengembangan asosiasi pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan koordinasi dan profesionalisme.

Dengan penguatan kelembagaan kepariwisataan yang baik, diharapkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun jenis pariwisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga sebagaimana terdapat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1. 2 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Purbalingga

No	Jenis Objek Wisata	Nama Tempat Wisata
1	Wisata Buatan	Owabong, Pancuran Ciblon Bobotsari, Pemandian Tirta Asri Walik serta Klawing Rafting Adventure
2	Wisata Edukasi	Objek Wisata Sanggaluri Parkserta Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran
3	Wisata Religi	Masjid Muhammad Chengho, Petilasan Syeh Jambu Karang, Masjid Agung Darussalam serta Makam Wali Perkasa.
4	Wisata Alam	Argo Wisata Lembah Asri Serang (Desa wisata Serang), Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet Pos Bambang, Desa Wisata Panusupan, Desa Wisata Tanalumserta Desa Wisata Limbasari.
5	Wisata Sejarah	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman.

Sumber: Kabupaten Purbalingga dalam Angka (2017)

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan pariwisata di Purbalingga masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya promosi yang efektif, serta keterbatasan fasilitas akomodasi yang berbanding terbalik dengan jumlah wisatawan yang datang. Selain karena permasalahan tersebut, pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan juga dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

**Tabel 1. 3 Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Purbalingga
(Orang)**

Tahun	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)
2018	3,798,280	-	731	-
2019	3.279.292	-13,30	149	-79,62
2020	1.387.862	-58,21	50	-66,44
2021	1.068.495	-22,88	0	-100,00
2022	1,695,084	59,71	6	0,00

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, diolah penulis (2023)

Salah satu strategi pengembangan pariwisata yang semakin berkembang adalah konsep desa wisata, yaitu kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik wisata berbasis budaya, alam, dan kehidupan masyarakat lokal. Desa wisata tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan masyarakat desa secara langsung. Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata (Inskeep, 2010). Menurut Nuryanti (dalam Budasi; 2012) kawasan desa wisata juga harus memiliki berbagai fasilitas akomodasi untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata.

Desa memiliki kontribusi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dengan menggali potensi desa yang dimiliki dengan tujuan pengembangan dan kemajuan desa, masyarakat akan optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah.

Pergub Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 7 menyatakan bahwa kelembagaan pengelola desa wisata dapat berbentuk koperasi, perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan BUM Desa.

Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan berbagai desa wisata sejak tahun 2013, salah satunya adalah Desa Wisata Limbasari. Desa Wisata Limbasari terletak di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dengan berbagai potensi wisata, seperti wisata alam, budaya, religi, dan pendidikan. (dalam tabel 1.4) Desa ini mulai dikembangkan sejak tahun 2013 dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Patrawisa, yang resmi dibentuk pada tanggal 20 Mei 2012 yang beranggotakan masyarakat desa sekitar dan sekretariat berada di dusun II yaitu Arjosari. Desa Limbasari ini memiliki empat dusun, yaitu dusun Limbasari, dusun Arjosari, dusun Karangjoho, dan dusun Sitrondol.

Tabel 1. 4 Potensi Wisata Desa Limbasari

No	Jenis Wisata	Potensi
1.	Wisata alam	Tubing Sungai Tuntung gunung, Bendung Patrawisa, Bukit Patrawisa, Air terjun Uncanguncang, Air terjun Pangamun-amun, Gunung Plana, Gunung Tukung.
2.	Wisata budaya	Batik Limbasari, Situs-situs peninggalan zaman neolitikum.
3.	Wisata religi	Legenda Putri Ayu Limbasari, Pertapaan Tunggul Wulung.
4.	Wisata Pendidikan	Gendhis Jawi, Kebun Belajar, Kampung Inggris

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga (2016)

Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 556/297 Tahun 2013 tentang Penetapan Desa Limbasari Kecamatan Bobosari Kabupaten Purbalingga sebagai Desa Wisata menerangkan bahwa Desa Limbasari merupakan sebuah Desa Wisata yang pengembangannya perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Desa Limbasari memiliki organisasi yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari yaitu Pokdarwis Patrawisa (Kelompok Sadar Wisata). Ketua Pokdarwis Patrawisa mengatakan bahwa pada tahun 2013, Desa Wisata Limbasari ini menjadi desa wisata terbaik se-Purbalingga.

Memiliki daya tarik yang beragam, pengelolaan Desa Wisata Limbasari masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya promosi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Data menunjukkan bahwa Desa Wisata Limbasari berhasil menduduki peringkat kedelapan dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Purbalingga pada tahun 2022. Namun, dibandingkan dengan desa wisata lain yang berkembang sejak 2013 juga seperti Desa Wisata Serang, Desa Wisata Limbasari masih tertinggal jauh dalam hal jumlah pengunjung dan pendapatan yang dihasilkan.

**Tabel 1. 5 Jumlah Pendapatan dan Pengunjung Desa Wisata Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022**

No	Nama Desa Wisata	Pendapatan (Rp)	Pengunjung
1.	Desa Wisata Serang	2,425,195,000	257,292
2.	Desa Wisata Karangcegak	369,050,000	73,814
3.	Desa Wisata Gemuruh	111,850,000	11,185
4.	Desa Wisata Tlahab Kidul	108,504,000	13,563
5.	Desa Wisata Karangbanjar	74,090,000	14,818
6.	Desa Wisata Tanalum	73,970,000	14,794
7.	Desa Wisata Onje	55,180,000	5,518
8.	Desa Wisata Limbasari	52,610,000	5,261
9.	Desa Wisata Kedung Benda	38,705,000	7,741
10.	Desa Wisata Sangkanayu	28,875,000	5,775
11.	Desa Wisata Sirau	26,025,000	5,205
12.	Desa Wisata Slinga	23,683,000	6,517
13.	Desa Wisata Gunung Wuled	19,465,000	3,893
14.	Desa Wisata Karangcengis	14,455,000	2,891
15.	Desa Wisata Selakambang	12,855,000	2,571
16.	Desa Wisata Panusupan	6,675,000	1,335
17.	Desa Wisata Tumanggal	4,850,000	670
18.	Desa Wisata Bumi Sari	2,020,000	404
19.	Desa Wisata Bantar Barang	0	0
20.	Desa Wisata Bokol	0	0
21.	Desa Wisata Cipaku	0	0
22.	Desa Wisata Kaliori	0	0
23.	Desa Wisata Karangjengkol	0	0
24.	Desa Wisata Karangreja	0	0
25.	Desa Wisata Karangtalun	0	0
26.	Desa Wisata Kutabawa	0	0
27.	Desa Wisata Pagerandong	0	631
28.	Desa Wisata Pekiringan	0	0
29.	Desa Wisata Pepedan	0	30
30.	Desa Wisata Serayu Larangan	0	0
31.	Desa Wisata Siwarak	0	0

Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2022, diolah penulis (2023)

Melihat beragam potensi yang dimiliki (dalam tabel 1.4), Desa Wisata Limbasari layak untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata yang menarik dan potensial, namun kenyataannya pada saat ini potensi yang dimiliki belum dikembangkan secara maksimal, hanya potensi sungai yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Selain banyak potensi yang belum dikembangkan secara maksimal, Desa Wisata Limbasari juga belum maksimal dalam melakukan promosi kepada wisatawan. Desa wisata Limbasari belum memiliki *website* sendiri ataupun sosial media yang mumpuni untuk mempromosikan desa tersebut. *Website* yang memperkenalkan Desa Wisata Limbasari hanya *website* dari Jadesta Kemenparekraf, bahkan di dalam *website* tersebut belum terdapat gambaran secara rinci apa saja yang terdapat di dalam desa wisata tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh Prasetyo, Novian Dwi yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dengan salah satu anggota Pokdarwis Patrawisa (2022), menyatakan bahwa pengembangan desa wisata bukan tanpa hambatan, peran aktor dalam pengembangan pariwisata dirasa masih kurang maksimal. Kebanyakan program pengembangan desa wisata yang berjalan ialah berawal dari inisiasi pemerintah kabupaten, kesadaran dan inovasi dari masyarakat maupun Pokdarwis masih sangat kurang, hal tersebut berakibat pada bertumpunya dan dominannya peran pemerintah kabupaten dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.

Dikutip dari *Purbalinggakab.go.id*, secara umum kendala pengembangan desa wisata di Kabupaten Purbalingga relatif sama. Diantaranya yaitu terkendala oleh infrastruktur yang masih kurang dan kurang sinerginya para aktor dalam pengembangan desa wisata.

“Kades Tanalum Kecamatan Rembang mengungkapkan, prasarana jalan menuju sejumlah curug yang menjadi pendukung desa wisata, kondisinya masih sempit. Misalnya, jalan menuju Curug Karang, meski sudah beraspal, namun tidak bisa untuk simpangan kendaraan roda empat. Begitu juga, prasarana jalan dari Dukuh Pucung Rumbak menuju curug Nagasari. Kondisi jalannya hanya selebar dua meter. Selain persoalan fasilitas jalan, Kepala Desa Tanalum juga mengungkapkan persoalan kesadaran pedagang dan pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Kondisi ini terjadi hampir di setiap tempat wisata di Purbalingga”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Karini, Zulia, dkk yang merupakan dosen dari Universitas AMIKOM Purwokerto dengan sekretaris Basecamp Utara (2018) menyatakan terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari, yaitu yang pertama dengan adanya wisatawan yang tidak hanya wisatawan lokal namun wisatawan asing juga datang ke Desa Limbasari yang menjadikan bahasa menjadi kendala utama berkomunikasi bagi anggota Pokdarwis Desa Limbasari. Bahasa Inggris tidak sepenuhnya dikuasai oleh beberapa anggota Pokdarwis, sehingga apabila ada wisatawan dari mancanegara berkunjung ke desa mereka kesulitan dan tidak dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan maupun objek-objek wisata yang ada secara maksimal. Yang kedua, pengelola *homestay* dan pengelola program paket wisata belum memiliki brosur yang komprehensif bagi wisatawan hal ini berkontribusi dalam penurunan jumlah pengunjung di Desa Wisata Limbasari. Dan yang ketiga, yaitu mengenai pemasaran potensi wisata yang saat ini tampak baru sebatas informasi dari mulut ke mulut, sehingga kedatangan wisatawan ke daerah ini belum bersifat masif namun hanya bersifat “tujuan wisata persinggahan sejenak” (*drop by destination*). Walaupun ada *website* namun belum berkembang secara optimal dan perlu di-*update*.

Pengembangan Infrastruktur khususnya prasarana jalan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi tantangan pengembangan sejumlah desa wisata di Purbalingga, termasuk di Desa Wisata Limbasari. Prasarana jalan menuju beberapa objek wisata hanya bisa diakses dengan kendaraan kecil, tidak mampu dengan bus besar. Sementara, masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya menjaga desa wisata, diantaranya para pengunjung dan pedagang yang masih sering membuang sampah sembarangan. Sehingga lagi-lagi pemerintah kabupaten yang harus melakukan *maintanance* dan *controlling* secara rutin demi keberhasilan pengembangan desa wisata.

Scott mendefinisikan kelembagaan sebagai struktur sosial yang memiliki ketahanan tinggi dan terdiri dari tiga pilar, yaitu regulatif (berkaitan dengan aturan formal, hukum, dan regulasi yang mengatur perilaku melalui mekanisme sanksi dan insentif), normatif (mencakup norma sosial, nilai, dan kewajiban yang menuntun perilaku individu dan organisasi tentang apa yang dianggap tepat atau tidak), dan kognitif (berkaitan dengan keyakinan bersama, dan pemahaman yang membentuk cara individu dan organisasi memandang realitas dan bertindak sesuai dengan itu) yang memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Berdasarkan teori kelembagaan menurut Scott, dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari ada beberapa hal yang masih belum maksimal, yaitu pada pilar normatif dan pilar kognitif dimana dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari masyarakat masih belum terlibat secara aktif.

Desa Wisata Limbasari merupakan desa wisata yang layak untuk dikembangkan karena didukung dengan adanya potensi wisata yang beragam serta kondisi alam yang menarik. Pengembangan di Desa Wisata Limbasari diharapkan dapat menarik minat

wisatawan untuk berkunjung. Melihat berbagai tantangan yang ada, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi Desa Wisata Limbasari. Permasalahan yang ada tidaklah dapat selesai jika terdapat unsur yang pasif dalam proses pengelolaan Desa Wisata Limbasari. Dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis **“Bagaimana kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga”** guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan daya saing desa wisata ini di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata Limbasari, yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Desa Wisata Limbasari. Permasalahan ini berbanding terbalik dengan salah satu aspek utama yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal yang di mana Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata.
- 2) Rendahnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan desa wisata Limbasari sehingga proses pengelolaan terlihat berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015, disebutkan bahwa pengembangan pariwisata harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari Kabupaten Purbalingga?
- 2) Apa faktor penghambat dalam kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga.
- 2) Menganalisis faktor penghambat kelembagaan dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait seperangkat teori di dalam manajemen publik khususnya dalam melaksanakan manajemen pengelolaan di berbagai sektor terutama di sektor pariwisata dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan. Penelitian ini juga digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis kelembagaan pengelola desa wisata di Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga.

1.5.2 Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Melalui pelaksanaan penelitian ini, peneliti memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama masa studi, sekaligus mengembangkan keterampilan dalam menyusun karya ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan yang dipelajari.

2) Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan objektif dari pihak eksternal mengenai tata kelola kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan strategi kelembagaan yang lebih efektif.

3) Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi pembaca, khususnya terkait dengan konsep dan praktik kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran kelembagaan dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada sejumlah studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini. Penelusuran terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas kajian yang dilakukan, sekaligus memastikan bahwa penelitian ini tidak merupakan hasil plagiarisme. Adapun beberapa studi terdahulu yang

relevan disajikan dalam bentuk artikel ilmiah yang terpublikasi dalam berbagai jurnal akademik. Peneliti dalam penelitian ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga.

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Syahputra, Meyranda; Suryaningsih; 2025 Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Resun	Menganalisis peran Pokdarwis dalam pengembangan potensi desa wisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat di Desa Resun.	Kualitatif	Sinergi antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintah, dan institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas manajerial sektor pariwisata. Implementasi model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Desa Resun telah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Meskipun demikian, tantangan terkait pengelolaan yang efektif serta pemerataan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata masih menjadi isu yang perlu diselesaikan secara berkelanjutan
2.	Titi, Darmi; Ririn, Harin; 2025 Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata	Pendampingan penguatan kelembagaan pengelolaan Desa Wisata Cawang Lama Kabupaten Rejang Lebong.	Penelitian dan survei lapangan, pelatihan, dan pendampingan teknis	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata, perbaikan infrastruktur desa wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta penguatan ekonomi desa. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian

				lingkungan dan budaya lokal. Penguatan kelembagaan desa diwujudkan melalui pembentukan dan pengembangan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta BUMDes yang mengelola sektor pariwisata secara profesional.
3.	Darsana, I Made; dkk; 2024 Penguatan Struktur Organisasi dan Pemasaran Digital dalam Optimalisasi Desa Wisata di Kabupaten Badung	Menganalisis kondisi kelembagaan desa wisata serta mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan.	Kualitatif deskriptif	Penguatan struktur kelembagaan, perbaikan infrastruktur, serta optimalisasi promosi berbasis digital merupakan langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan kalangan akademisi menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Melalui penerapan strategi pemasaran digital yang efektif serta program pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan, diharapkan desa-desa wisata di wilayah Kabupaten Badung mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, bagi komunitas setempat.
4.	Wahyuni; dkk; 2024 Pengaruh Kepemimpinan dan Manajemen Kelembagaan pada Sektor Pariwisata	Menelaah dan mengkaji dengan lebih detail problematika keorganisasian yang dialami oleh pemerintah Desa Gubugklakah.	Kualitatif	Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa selain potensi sumber daya alam, Desa Gubugklakah juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang menonjol, yang perlu didukung oleh sistem manajemen kelembagaan yang efektif.

				Dengan pengelolaan kelembagaan desa yang baik, ketimpangan dalam kapasitas sumber daya manusia dapat diminimalkan, sehingga pengembangan desa dapat berjalan secara lebih merata dan berkelanjutan.
5.	Rahman; dkk; 2024 Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sintung, Kabupaten Lombok Tengah	Menganalisis peran kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Sintung, Kabupaten Lombok Tengah.	Kualitatif deskriptif	Desa Wisata Sintung memiliki potensi wisata alam dan wisata minat khusus yang tinggi, namun pengembangannya masih terkendala oleh kelembagaan yang belum optimal. Pokdarwis berperan dalam mempromosikan wisata, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan destinasi, pemasaran, dan penguatan jaringan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Diperlukan penguatan kelembagaan Pokdarwis agar mampu meningkatkan daya saing desa wisata serta berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
6.	Priansa, D. J; dkk; 2024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengelolaan dan Pelayanan Desa Wisata Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pelayanan Desa Wisata Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.	Pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan diskusi interaktif yang melibatkan 31 peserta dari berbagai pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan.	Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait strategi pengelolaan destinasi wisata, teknik pemasaran, serta upaya pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta mencerminkan komitmen mereka untuk turut berperan aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Patengan.
7.	Widagyo, Kurniawan Gilang;	Memetakan kebutuhan serta	Kualitatif	Progran kegiatan ini menghasilkan sejumlah

	Sari, Heni Pridia Rukmini; 2023 Kegiatan Pendampingan Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pokdarwis Desa Wisata Watesjaya	kemampuan yang diperlukan oleh pengelola desa wisata. Pelatihan dan pendampingan kelembagaan bagi pengelola desa wisata meliputi kemampuan kepemimpinan serta pelatihan teknis.		luaran penting, antara lain pengesahan legalitas pembentukan organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Hegarmukti, penyusunan sistem tata kelola organisasi, serta perumusan pembagian tugas dan fungsi yang jelas bagi setiap anggota dalam struktur kepengurusan.
8.	Ferri, Wicaksono; Agustina, Rahmawati: Sudiin; Nur, Eka Hardiyansya Ramadhan; 2023 Pembangunan Kelembagaan Rintisan Desa Wisata pada Desa Wisata Diro, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman	Menganalisis Pembangunan kelembagaan rintisan Desa Wisata Diro, Kabupaten Sleman.	Kualitatif deskriptif	Kelembagaan Desa Wisata Diro belum optimal, ditunjukkan oleh ketiadaan dokumen standar prosedur layanan. Namun, terdapat pemberdayaan elemen penting warga, seperti tokoh masyarakat, dalam pengelolaan desa wisata.
9.	Sulistyo, A.; dkk; 2023 Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Melalui Kampanye Sadar Wisata 5.0 dalam Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan	Memperkuat fungsi kelembagaan POKDARWIS dan lembaga masyarakat lainnya melalui implementasi kampanye sadar wisata 5.0 untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan.	Pengabdian masyarakat dengan pendampingan kepada POKDARWIS, kelompok PKK, pelaku seni dan budaya, serta organisasi karang taruna. Peserta yang terlibat berjumlah 60 orang.	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 85% peserta telah memahami pentingnya kampanye sadar wisata sebagai instrumen dalam memperkuat kelembagaan guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap tata kelola sektor pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan, serta berhasil menyatukan persepsi masyarakat yang kemudian dituangkan secara formal dalam bentuk nota kesepahaman.
10.	Hidayat, Taufiq; Muchtar, Arisman; 2022	Menggambarkan kapasitas dan peran	Kualitatif deskriptif	Desa Wisata Lamajang telah menunjukkan kapasitas yang cukup baik, baik dari segi

	Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal	kelembagaan dalam program pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal.		kelembagaan maupun individu pelaku wisata. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata di desa ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh status Desa Wisata Lamajang yang masih berada dalam tahap perintisan. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya sinergi antara badan pengelola desa wisata dengan lembaga-lembaga lokal di bawah naungan pemerintah desa, seperti Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan lainnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan juga masih terbatas, sehingga potensi lokal belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mendukung pembangunan pariwisata berbasis komunitas.
11.	Budi, Permadi; Muhammad, Wahid; M. Lega; 2021 Analisis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Desa Wisata Danau Sigombak di Desa Teluk Kembang Jambu, Kabupaten Tebo	Menganalisis peran masyarakat dalam proses pengelolaan Wisata Pasar Ciplukan dan menguraikan hambatan serta strategi pengelolaan wisata berkelanjutan.	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan Desa Wisata Danau Sigombak belum optimal dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam

				pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
12.	Paskasari, Clara Shinta; Guntoro, Budi; Witjaksono, Roso; 2020 Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman	Memetakan kapasitas kelembagaan yang dilihat dari aspek manajerial, pengelolaan sumber daya, dan partisipasi.	Kualitatif deskriptif	Secara manajerial, kemampuan dalam mengelola program dan proses kerja masih tergolong lemah. Namun, dalam aspek pengelolaan hubungan serta kolaborasi antar pihak, telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sementara itu, pengelolaan sumber daya masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, maupun teknologi. Tingkat partisipasi juga dinilai rendah, disebabkan oleh minimnya keterlibatan aktif dari beberapa pengelola yang sudah tidak lagi berkontribusi secara optimal.

Sumber: Jurnal yang diolah 2025

Penelitian terdahulu di atas yang sudah dipaparkan bertujuan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan tidak memplagiasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama, serta fokus dan lokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan semuanya berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu berguna sebagai sumber referensi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk menjadi acuan penulis dalam menambah teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian.

1.6.2 Administrasi Publik

Secara etimologis, istilah "administrasi" berasal dari bahasa Latin, yakni dari gabungan kata *ad* yang berarti "kepada" dan *ministrare* yang berarti

"melayani" atau "membantu". Secara operasional, istilah ini mengandung makna tindakan untuk memberikan bantuan, pelayanan, atau pemenuhan terhadap suatu kebutuhan. Dari akar kata tersebut kemudian terbentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus* dalam bahasa Latin. Istilah ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi *administration*, yang pada akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan bentuk "administrasi". Perkembangan istilah ini mencerminkan perluasan makna dari sekadar aktivitas pelayanan menjadi suatu sistem atau proses yang lebih kompleks dalam mengelola sumber daya secara terorganisir. (Hadari, 1994:23).

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019:3), administrasi publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik dalam rangka merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Keduanya menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kombinasi antara seni dan ilmu (*art and science*) yang berperan dalam mengatur urusan-urusan publik serta menjalankan berbagai fungsi pemerintahan yang telah ditentukan. Konsep administrasi publik sendiri berakar dari pemahaman mengenai peran pemerintah sebagai entitas yang diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan

kesejahteraan publik. Masyarakat diposisikan sebagai entitas kolektif yang tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan publik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

1.6.3 Paradigma Manajemen Publik

Paradigma dalam Manajemen Publik telah mengalami sejumlah transformasi seiring perkembangan zaman. Awalnya, pendekatan yang digunakan adalah *Old Public Administration* (OPA), yang kemudian berkembang menjadi *New Public Management* (NPM), dan selanjutnya melahirkan konsep *New Public Service* (NPS). Pergeseran ini turut mengubah cara pandang terhadap peran pemerintah, dari yang semula berpusat pada *government* menjadi *governance*, yang lebih inklusif dan partisipatif. Perubahan paradigma tersebut mendorong munculnya konsep *collaborative governance*, yaitu model tata kelola yang melibatkan tidak hanya institusi pemerintah, tetapi juga pihak ketiga seperti kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses pengambilan keputusan serta penyelesaian persoalan publik.

Konsep OPA yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dapat dirangkum dalam dua pokok pemikiran utama. Pertama, adanya pemisahan antara ranah politik dan administrasi. Menurut Wilson (sekitar tahun 1887), urusan politik harus berfokus pada perumusan kebijakan dan tujuan negara, sementara administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara netral dan bebas dari kepentingan politik. Dalam hal ini, administrator publik bertanggung

jawab kepada pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme demokratis, dan secara tidak langsung bertanggung jawab kepada masyarakat. Kedua, administrator publik dituntut untuk mencapai efisiensi maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi tersebut dicapai melalui penerapan prinsip keseragaman dan struktur hierarkis dalam organisasi pemerintahan. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh gagasan tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Frederick W. Taylor, Lyndall Urwick, dan Luther Gulick. Taylor, melalui karyanya *The Principles of Scientific Management*, menekankan bahwa efisiensi kerja manusia dapat dicapai secara optimal melalui penerapan *time and motion studies*, yakni studi sistematis mengenai waktu dan gerakan kerja untuk meningkatkan produktivitas.

Paradigma *New Public Management* (NPM) muncul sebagai respons dari para akademisi dan praktisi administrasi negara terhadap berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah, baik di negara maju maupun berkembang. Kehadiran NPM merupakan hasil dari kegelisahan intelektual atas ketidakmampuan pendekatan konvensional dalam administrasi publik, yang dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan eksternal serta krisis multidimensi yang melanda sektor publik. Ketidakpuasan terhadap model ortodoks tersebut mendorong lahirnya kerangka alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan global dan tuntutan masyarakat modern. Dalam karya berjudul *The New Public Management in Action* oleh Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, dan Pettigrew (1997), dijelaskan bahwa NPM merupakan pendekatan yang mengadopsi prinsip-prinsip manajerial dari

sektor bisnis dan ilmu manajemen lainnya ke dalam praktik administrasi publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja birokrasi dalam memberikan layanan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya orientasi hasil, akuntabilitas, dan penggunaan mekanisme pasar sebagai cara untuk mereformasi organisasi publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif *New Public Service* (NPS), konsep warga negara sebagai pelanggan sering kali menimbulkan perdebatan, baik dalam ranah praktik pemerintahan maupun diskursus akademik. Hal ini terjadi karena tidak semua bentuk pelayanan publik dapat dikaitkan secara langsung dengan individu sebagai pelanggan. Misalnya, kebijakan luar negeri atau upaya pelestarian lingkungan tidak ditujukan kepada satu individu tertentu, tetapi ditujukan bagi seluruh masyarakat secara kolektif, tanpa memperhitungkan apakah individu tersebut menghendaki layanan itu atau tidak. Dalam konteks lain, seperti program wajib belajar, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama, yakni usia 7 hingga 15 tahun. Dalam hal ini, anak-anak tersebut tidak dapat diposisikan sebagai pelanggan lembaga pendidikan negara dalam arti sempit, melainkan sebagai pihak yang menjadi subjek dari kewajiban negara. Meskipun demikian, pelaksanaan tanggung jawab ini tetap mengharuskan pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan minimal guna menjamin kualitas dan pemerataan layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Paradigma *governance* atau tata kelola pemerintahan menjadi perkembangan penting dalam kajian administrasi publik, yang mulai mengemuka sejak akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Munculnya gagasan *good governance* didorong oleh kekhawatiran bahwa kegagalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Afrika. Pandangan ini diperkuat oleh laporan Bank Dunia tahun 1989 yang secara tegas menyebut bahwa krisis pembangunan di Afrika pada dasarnya merupakan krisis dalam tata pemerintahan. Dalam hal ini, istilah ‘pemerintahan’ merujuk pada mekanisme penggunaan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, konsep *good governance* mulai diterapkan secara bertahap dalam kurun waktu sekitar 15 tahun terakhir, terutama saat lembaga-lembaga donor internasional menjadikan prinsip pemerintahan yang baik sebagai prasyarat dalam pemberian bantuan pembangunan. Menurut Sedarmayanti (2003:2), *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk menyediakan barang dan layanan publik secara optimal. Implementasinya menuntut adanya komitmen kolektif dari seluruh anggota organisasi atau institusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pelayanan publik.

Paradigma ini juga menetapkan standar baru dalam sistem pemerintahan, di mana penyelenggaraan pelayanan publik menjadi pusat

perhatian dan indikator kualitas tata kelola. *Good governance* menuntut adanya praktik *clean governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan gratifikasi, serta *open governance*, yakni transparansi dalam perencanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan penyediaan data publik, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Secara keseluruhan, paradigma *good governance* merepresentasikan cara baru dalam penyediaan barang dan layanan publik, serta mencerminkan tuntutan masyarakat akan tiga nilai utama dalam pemerintahan: integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketiga nilai tersebut pada akhirnya terkonvergensi dalam satu prinsip utama, yaitu *public value*—nilai yang diharapkan masyarakat dari tata kelola pemerintahan yang responsif dan terpercaya.

Pada penelitian ini menggunakan paradigma *Governance*. Konsep *governance* menjelaskan terkait kelembagaan, *public value*, dan proses kolaborasi untuk perkembangan pemerintahan ke arah pemerintah yang baik (*good governance*) dengan melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang ada di Desa Wisata Limbasari.

Paradigma *Governance* dan model kelembagaan yang diimplementasikan dalam pengelolaan pariwisata memiliki kaitan yang erat karena sama-sama berfokus pada pengelola dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang pariwisata yang lebih baik.

1.6.4 Kelembagaan

Teori Institusional, atau yang dikenal juga sebagai *Institutional Theory*, menjelaskan bahwa keberadaan dan pembentukan suatu organisasi tidak semata-mata didorong oleh efisiensi internal, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh tekanan dari lingkungan institusionalnya. Tekanan tersebut dapat bersumber dari norma sosial, regulasi formal, ataupun ekspektasi masyarakat yang mengarah pada proses institusionalisasi, yakni penanaman nilai-nilai, aturan, dan struktur yang diterima secara luas. Dasar pemikiran dari teori ini menyatakan bahwa agar dapat bertahan dan memperoleh legitimasi sosial, sebuah organisasi harus mampu menunjukkan bahwa keberadaannya memiliki keabsahan di mata publik. Legitimasi ini menjadi prasyarat utama untuk mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk kepercayaan, sumber daya, maupun keberlanjutan operasional. Oleh karena itu, organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan norma dan struktur institusional yang dominan guna mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang (Ridha dan Basuki; 2012 dalam Wikke; 2018).

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam *repository* UMY).

Kelembagaan meliputi dua makna yakni norma serta konvensi dan aturan main. Kelembagaan terkadang ditulis dengan resmi dan didukung aparat berwajib, namun kelembagaan berbentuk non tertulis secara formal

contohnya pada peraturan adat dan aturan yang diyakini masyarakat. Kelembagaan secara umum merupakan korelasi kepentingan atau mekanisme guna kelangsungan sekumpulan kepentingan. Nuraini, dkk. (2016) memberikan penjelasan bahwa kelembagaan merupakan aktivitas menyeluruh dalam konteks monitor atau yurisdiksi, liberalisme dan ekspansi kegiatan dari seorang pribadi.

Menurut Veblen (dalam Wikke; 2018), kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (*individual preferences*) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.

Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Teori Kelembagaan atau Teori Institusional yang dikembangkan oleh W. Richard Scott pada tahun 2001 (dalam Hutasoit, dkk; 2024) menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga sosial terbentuk, berfungsi, dan mempengaruhi perilaku individu serta organisasi di dalamnya. Scott mendefinisikan lembaga sebagai struktur sosial yang memiliki ketahanan tinggi, terdiri dari elemen-elemen regulatif, normatif, dan kognitif yang memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Tiga Pilar Kelembagaan menurut Scott:

1. Pilar Regulatif (*Regulative Pillar*), merupakan elemen yang berkaitan dengan aturan formal, hukum, dan regulasi yang mengatur perilaku melalui mekanisme sanksi dan insentif.
2. Pilar Normatif (*Normative Pillar*), merupakan elemen yang mencakup norma sosial, nilai, dan kewajiban yang menuntun perilaku individu dan organisasi tentang apa yang dianggap tepat atau tidak.
3. Pilar Kognitif (*Cognitive Pillar*), merupakan elemen yang berkaitan dengan skema kognitif, keyakinan bersama, dan pemahaman yang membentuk cara individu dan organisasi memandang realitas dan bertindak sesuai dengan itu.

Implikasi Teori Kelembagaan Scott:

- Isomorfisme Institusional: Organisasi cenderung menjadi homogen karena tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma, regulasi, dan harapan yang berlaku dalam lingkungan institusional mereka.

- Legitimasi: Kepatuhan terhadap elemen-elemen kelembagaan meningkatkan legitimasi organisasi, yang penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan jangka panjang.
- Perubahan Institusional: Meskipun lembaga cenderung stabil, mereka dapat berubah melalui proses yang bertahap atau revolusioner, dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal.

Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana struktur sosial, aturan, dan norma mempengaruhi perilaku organisasi dan individu, serta bagaimana organisasi beradaptasi dengan tekanan institusional untuk mencapai legitimasi dan keberlanjutan.

Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).

Penyesuaian terhadap harapan eksternal atau harapan harapan sosial dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan pribadi mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa jadi akan memiliki kesamaan atau isomorfisme

(*isomorphism*) dengan organisasi publik lainnya. Perspektif yang dikemukakan oleh Ridha dan Basuki (2012) menyebutkan bahwa muncul bentukan-bentukan dari Institusional yang bersifat *isomorphism*.

Isomorfisme (*isomorphism*) yaitu suatu proses yang mendukung atau mendorong satu unit kedalam populasi untuk menyerupai unit yang lainnya guna menghadapi pada kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan suatu kemiripan (Ridha dan Basuki; 2012 dalam Wikke; 2018).

Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan professional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior), dan mimetik (ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). Isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan. Isomorfisme normatif adalah bentuk komitmen manajemen, dimana didalam organisasi jika semakin tinggi isomorfisme normatif maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal. Sedangkan isomorfisme mimetik merupakan terjadinya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, dimana ketika terjadi isomorfisme mimetik atasan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil.

A. Prinsip Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana institusi atau lembaga terbentuk, berfungsi, dan berkembang dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip utama teori kelembagaan berdasarkan perspektif para ahli:

1. Teori Kelembagaan Lama (*Old Institutionalism*), dikemukakan oleh Thorstein Veblen (1899) dan Max Weber (1922), prinsip utamanya yaitu:
 - Kelembagaan dianggap sebagai struktur sosial yang menetapkan aturan, norma, dan kebiasaan dalam suatu masyarakat.
 - Lembaga berperan dalam membentuk perilaku individu dan mengatur kehidupan sosial.
 - Fokus utama teori ini adalah pada birokrasi, struktur organisasi, dan peran negara dalam membentuk regulasi kelembagaan.
2. Teori Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*), dikemukakan oleh Douglass North (1990), Paul DiMaggio & Walter Powell (1983), prinsip utamanya:
 - Kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal tetapi juga norma sosial dan budaya yang berkembang.
 - Institusi berkembang melalui interaksi antara aktor sosial dan ekonomi.
 - Ada tiga jenis tekanan yang membentuk kelembagaan menurut DiMaggio & Powell:

- a. **Tekanan Koersif** (*Coercive Isomorphism*): Aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak berwenang.
 - b. **Tekanan Mimetik** (*Mimetic Isomorphism*): Organisasi meniru praktik sukses dari organisasi lain untuk mengurangi ketidakpastian.
 - c. **Tekanan Normatif** (*Normative Isomorphism*): Praktik kelembagaan dipengaruhi oleh norma profesional dan pendidikan.
3. Teori Kelembagaan Ekonomi, yang dikemukakan oleh Oliver William (1975), prinsip utamanya, yaitu:
 - Lembaga ekonomi terbentuk sebagai solusi untuk mengurangi biaya transaksi dalam suatu sistem.
 - Organisasi dan institusi berkembang untuk meminimalkan ketidakefisienan ekonomi.
 - Hubungan antara aktor dalam kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kontrak dan mekanisme insentif.
4. Teori Kelembagaan Sosiologis, dikemukakan oleh John W. Meyer dan Brian Rowan (1977), prinsip utamanya, yaitu:
 - Kelembagaan berkembang berdasarkan konstruksi sosial dan norma yang diterima secara luas dalam masyarakat.
 - Organisasi sering kali mengadopsi praktik kelembagaan bukan karena efisiensi, tetapi untuk memperoleh legitimasi di mata publik.

- Ada kecenderungan organisasi untuk mengikuti aturan yang telah diinstitusionalisasikan demi menjaga citra dan kepercayaan masyarakat.

Jadi, secara umum, teori kelembagaan menekankan bahwa institusi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh budaya, norma sosial, dan tekanan eksternal. Perspektif ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu desa wisata dikelola, bagaimana aktor-aktor di dalamnya berinteraksi, serta faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kelembagaan di desa wisata seperti Desa Wisata Limbasari.

B. Faktor Penghambat Kelebagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Limbasari

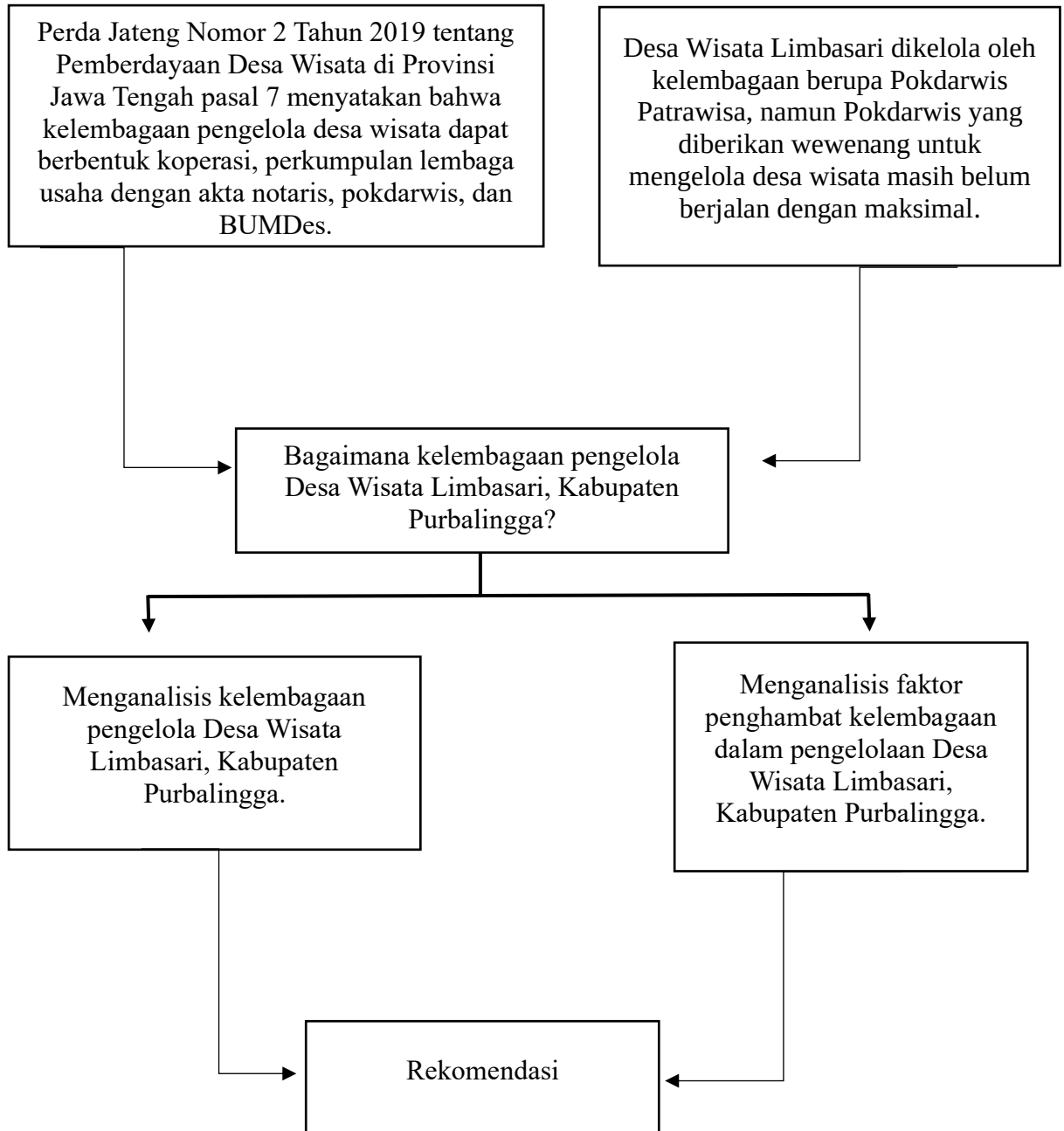
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gian Rahmad, Septiana Widyaningtyas, dan Anik Widiastuti, ditemukan bahwa faktor penghambat kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya tenaga kerja yang kompeten dan berkomitmen menjadi kendala utama. Banyak warga yang bekerja atau bersekolah di luar desa, serta minimnya pelatihan dan motivasi untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata.
2. Konflik Internal dan Kepentingan, Perbedaan persepsi antar warga dan pengurus desa wisata dapat menimbulkan konflik kepentingan, yang menghambat pelaksanaan program dan menurunkan semangat pengelola.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kurangnya infrastruktur pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, dan jaringan internet yang memadai dapat menghambat pengembangan desa wisata.
4. Lemahnya Perencanaan dan Sinergi Kelembagaan, Kurangnya koordinasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dapat menghambat sinergi kelembagaan.
5. Ketergantungan pada Pemerintah, Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah, baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan, dapat menghambat kemandirian desa wisata.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka Pikir Penelitian



1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 7 Fenomena Penelitian

Fokus/Tujuan Penelitian	Fenomena	Sub Fenomena	Informan dan Cara Pengumpulan Data
Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Limbasari	Pilar Regulatif	- Adanya regulasi pemerintah tentang Desa Wisata Limbasari - SOP dan kebijakan yang diterapkan oleh Pokdarwis - Kepatuhan pengelola Desa Wisata Limbasari terhadap regulasi	Informan: 1. Pokdarwis Patrawisa 2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga 3. Masyarakat Desa Limbasari 4. BUMDes Cara pengumpulan data dilakukan dengan: 1. Wawancara 2. Studi Pustaka
	Pilar Normatif	- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari - Norma sosial dalam menjaga kelestarian Desa Wisata Limbasari - Standar pelayanan wisata yang diterapkan	
	Pilar Kognitif	- Pemahaman masyarakat tentang manfaat desa wisata - Persepsi masyarakat tentang kinerja Pokdarwis - Kepercayaan masyarakat yang mendukung atau menghambat	

Faktor Penghambat Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Limbasari	Keterbatasan Sumber Daya Manusia		
	Konflik Internal dan Kepentingan		
	Keterbatasan Sarana dan Prasarana		
	Lemahnya Sinergi Kelembagaan		
	Ketergantungan pada Pemerintah		

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagai metode utama, yang bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan nilai dari suatu variabel secara mandiri tanpa melakukan perbandingan maupun mengaitkannya dengan variabel lain. Dalam hal ini, fokus analisis diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap variabel-variabel yang diteliti sebagaimana adanya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yakni suatu pendekatan yang dirancang untuk mengkaji serta menjelaskan fenomena sosial, peristiwa, perilaku, sikap, keyakinan, pandangan, maupun persepsi individu atau kelompok secara komprehensif. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada penafsiran makna yang terkandung dalam data empiris, yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara

sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguraikan permasalahan yang menjadi fokus kajian.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu:

- 1) Adanya praktik pelayanan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung, yang relevan dengan fokus penelitian.
- 2) Letaknya yang strategis memungkinkan peneliti untuk melakukan pendekatan sosial secara lebih efektif, khususnya kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Solihin, E. (2021) subjek penelitian kualitatif terdiri dari manusia, baik keberadaannya dalam suatu konteks maupun secara konseptual. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah informan atau narasumber. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sugiyono menyampaikan bahwa *purposive sampling* ialah mengambil sampel sumber data menggunakan pertimbangan khusus, misalnya informan tersebut dianggap sebagai orang yang paling tahu mengenai apa yang ingin kita peroleh, atau bisa juga orang tersebut merupakan penguasa sehingga akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk

menelusuri objek atau situasi sosial yang akan diteliti” (Sugiono dalam Suriani, N., & Jailani, M. S. 2023:34).

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015) jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data-data dari penelitian ini dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis. Adapun penjelasan kedua data itu adalah sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

b. Data Kuantitatif

Pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

B. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang berkaitan dengan bagaimana modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata

Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan *stakeholder* yang terkait dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Di samping wawancara, peneliti juga memperoleh data dari masyarakat desa dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun

teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses penelitian dengan cara bertatap muka dan tanya jawab. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak berstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pengelola desa wisata Desa Wisata Limbasari untuk mendapatkan data tertentu, terutama apabila data yang diperoleh melalui metode dokumentasi ada yang belum jelas.

2) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dengan menghimpun, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar, ataupun dokumen elektronik seperti halnya buku-buku referensi, artikel jurnal, dan media lainnya yang mendukung objek penelitian. Studi pustaka menjadi hal yang penting dilakukan guna menunjang data riset yang diterapkan dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga.

1.9.6 Metode Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan berbagai macam teknik analisis data. Diantaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisis, dan mengaplikasi, serta mengambil kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dan diklasifikasikan. Pengklasifikasian dan penganalisaan semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
2. Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian.
3. Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, menyeleksi, memutuskan, menganalisis, dan mengaplikasikan, serta mengambil kesimpulan.

1.9.7 Kualitas dan Validitas Data

Sugiyono (2015:92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif ini harus sesuai dengan standar akan kredibilitas (*credibility*) yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Moleong (2016: 330) menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding

data. Adapun nilai yang terletak di dalam teknik dalam menghimpun data dengan menerapkan triangulasi ialah langkah paling sesuai apabila hendak mengetahui data yang didapatkan dengan lebih luas lagi, berubah-ubah atau kontradiksi. Sehingga penerapan teknik triangulasi dalam menghimpun data penelitian menyebabkan data yang diperoleh bernilai konsisten, tuntas, dan akurat. Penerapan triangulasi mengakibatkan data lebih kuat apabila dibandingkan dengan menerapkan satu pendekatan. Langkah dalam mentrigulasi data yakni (dalam Moleong, 2009:330-331):

1. Membuat sebuah perbandingan data yang diperoleh melalui aktivitas pengamatan dengan data yang didapatkan melalui aktivitas wawancara.
2. Membentuk sebuah perbandingan dengan pernyataan yang dikatakan kepada khalayak umum dengan pernyataan yang diungkapkan secara personal.
3. Melakukan sebuah perbandingan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh publik terkait situasi selama penelitian berlangsung.
4. Membentuk sebuah perbandingan terkait kondisi dan sudut pandang seseorang dalam berpendapat, yakni berdasarkan tingkat pendidikan dan kedudukannya.
5. Melakukan sebuah perbandingan terkait hasil yang didapatkan melalui aktivitas wawancara terhadap sebuah dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.